

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
Triwulan III Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III 2026	Realisasi s.d Triwulan III 2026	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan (juta)	1.200	894,053*	879,397*	98,36
1.2	Indikator 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan (juta)	17-18	12,42*	12,91*	103,95
1.3	Indikator 1.3 Persentase Penyelesaian Konsep Muatan Substansi Tata Kelola Program IQTF	Persentase	100	72,5	60	82,75
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Persentase	80	70	70	100
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata</i>					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III 2026	Realisasi s.d Triwulan III 2026	Capaian (%)
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	-	-	N/A
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata	Persentase	92	86,9	86,9	100

*Angka proyeksi internal

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan menjadi dua indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
3. Persentase Penyelesaian Konsep Muatan Substansi Tata Kelola Program IQTF

1.1. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

Latar Belakang

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) adalah jumlah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia ke destinasi di dalam wilayah Indonesia untuk keperluan wisata, rekreasi, atau kegiatan pribadi lainnya di luar rutinitas sehari-hari dalam kurun waktu tertentu. Kunjungan tersebut tidak termasuk perjalanan yang bertujuan untuk bekerja sebagai aktivitas utama, bersekolah atau menempuh pendidikan formal, serta tidak dimaksudkan untuk berpindah domisili.

Dalam rangka mendukung indikator ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan ekosistem event termasuk perizinan, standarisasi venue, SDM, dan lainnya sehingga dapat meningkatkan kuantitas event yang diselenggarakan dan berkontribusi positif terhadap peningkatan pergerakan maupun kunjungan wisatawan nusantara. Kehadiran sistem digital ini juga turut mempermudah koordinasi lintas instansi, mempercepat proses persetujuan, serta mendorong terciptanya lebih banyak event yang pada akhirnya dapat menjadi pemicu

peningkatan mobilitas dan kunjungan wisatawan nusantara ke berbagai daerah. Selain itu, dalam pengembangan ekosistem pariwisata juga dilaksanakan melalui integrasi dan penetrasi ekosistem asuransi dalam ekosistem pariwisata untuk meningkatkan tata kelola risiko dalam aspek keselamatan pariwisata

Selain itu, untuk mendukung indikator ini juga dilakukan upaya penguatan ekosistem pariwisata melalui penguatan tata kelola risiko pariwisata, penguatan ekosistem wisata tematik, serta penguatan SDM pariwisata dalam rangka mendukung pariwisata yang berkualitas.

Indikator ini penting sebagai cerminan perkembangan sektor pariwisata domestik yang digerakkan oleh wisatawan nusantara, termasuk memahami minat dan preferensi wisatawan nusantara dalam menjelajahi, mengenal, dan menikmati keragaman destinasi serta potensi wisata yang tersebar di Indonesia.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam kegiatan pariwisata domestik. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dapat mencerminkan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk dan jasa wisata di dalam negeri, serta memberikan gambaran mengenai distribusi dan potensi ekonomi pariwisata antarwilayah. Minat dan daya beli masyarakat terhadap produk dan jasa wisata di dalam negeri dapat menjadi acuan untuk merencanakan dan menetapkan target pembangunan khususnya pada sektor pariwisata

Hasil Pengukuran Kinerja

Jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbaharui setiap 3 bulan (triwulan). Total Perhitungan jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara pada Triwulan III dihitung selama periode Juli s.d September tahun berjalan. Adapun rincian Realisasi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara hingga TW III 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan (juta)	1.200	894,053*	879,397*	98,36

*angka proyeksi internal

Capaian TW III diproyeksikan mencapai 98,36%, adapun data *publish* BPS tersedia hingga bulan Agustus dengan realisasi perjalanan wisnus sebesar 842,153 juta perjalanan. Proyeksi capaian jumlah perjalanan wisatawan nusantara didukung dengan adanya periode liburan Momentum Libur Nasional dan Sekolah: Periode awal Triwulan III yang masih beririsan dengan masa libur sekolah turut menjaga tren positif pergerakan wisatawan nusantara,

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Ekosistem Pariwisata	Terlaksana	1. Tersusunnya kajian tata kelola risiko kepariwisataan oleh Tim Technical Assistant dari ADB yang menghasilkan rekomendasi berupa: a. Regulasi: Harmonisasi regulasi perizinan usaha, standar keselamatan, dan kewajiban asuransi pariwisata. b. Koordinasi: Pembentukan mekanisme koordinasi pusat-daerah di bawah Kemenko Perekonomian. c. Kapasitas Kelembagaan: Penguatan SDM, peralatan, dan anggaran KSOP, Basarnas, serta BMKG. d. Infrastruktur: Peningkatan fasilitas pelabuhan, dermaga, dan perawatan kapal. e. Asuransi: Pengembangan skema asuransi terintegrasi bagi wisatawan, pelaku usaha, dan pendukung pariwisata berbasis risiko. f. Kompetensi SDM: Peningkatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata yang terintegrasi dengan perizinan usaha. 2. Telah dilaksanakan

			penyusunan kajian terkait tata kelola risiko kepariwisataan melalui asuransi pariwisata dengan pelaksanaan rakor bersama JRP sebagai mitra penyedia data pada 1, 8, 14 dan 17 Juli; serta 3, 11, 13, 22, 28, dan 31 Agustus 2026. 3. Diskusi dengan Kementerian Kesehatan terkait pengumpulan data untuk penyusunan kajian penguatan perlindungan wisatawan dan tata kelola risiko kepariwisataan pada 3 September 2026 4. Permohonan Audiensi untuk Pengumpulan Data dan Tanggapan ke Dirjen Perhubungan Laut dan KSOP Labuan Bajo. 5. Diskusi dengan Basarnas terkait pembentukan sistem keamanan pariwisata nasional pada 8 September 2026.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, beberapa kegiatan pendukung lain yang kami ikuti adalah Sosialisasi Petunjuk Teknis Penghitungan Dampak Event Pariwisata yang dilaksanakan oleh Kemenpar pada 16 September 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil berupa

1. Kajian tata kelola risiko kepariwisataan melalui asuransi pariwisata beserta;
2. Pembentukan kelompok kerja keselamatan pariwisata nasional dengan Basarnas;
3. Draft Perpres Sistem Keselamatan Pariwisata Nasional;
4. Juknis perhitungan dampak event pariwisata yang telah terstandarisasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan III tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan destinasi pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 30 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antarprogram dalam pengelolaan risiko kepariwisataan, khususnya antara program tata kelola risiko kepariwisataan dan pembentukan sistem keselamatan pariwisata nasional.
2. Belum meratanya pemahaman pemangku kepentingan terhadap petunjuk teknis perhitungan dampak event pariwisata akibat masih terbatasnya sosialisasi dan diseminasi informasi.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan sinkronisasi program tata kelola risiko kepariwisataan dengan program pembentukan sistem keselamatan pariwisata nasional.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif terkait petunjuk teknis perhitungan dampak event pariwisata.

1.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Latar Belakang

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) adalah jumlah orang asing yang melakukan perjalanan ke suatu negara lain (dalam hal ini Indonesia) untuk tujuan wisata, yang tidak terkait dengan pekerjaan atau pendidikan, dan berlangsung kurang dari enam bulan.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan wisman memiliki fungsi strategis sebagai salah satu tolok ukur kinerja sektor pariwisata nasional. Data ini tidak hanya mencerminkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata global, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Semakin tinggi angka kunjungan wisman, maka semakin besar pula potensi pemasukan devisa negara dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator ini, program kerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata berfokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata, terutama destinasi wisata prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata yang memiliki potensi besar dalam menarik minat wisatawan mancanegara.

Indikator jumlah kunjungan wisman digunakan untuk melihat performa pariwisata internasional Indonesia dan sebagai cerminan daya tarik destinasi wisata Indonesia di mata global. Data kunjungan ini juga menjadi acuan penting dalam mengevaluasi kebijakan konektivitas dan aksesibilitas pariwisata.

Hasil Pengukuran Kinerja

Jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbaharui setiap 3 bulan (triwulan). Total Perhitungan jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara pada Triwulan III dihitung selama periode Juli s.d September tahun berjalan. Adapun rincian Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara hingga TW III 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan (juta)	17-18	12,42*	12,91*	103,95

*angka proyeksi internal

Capaian TW III 2026 diproyeksikan mencapai 103,95% dengan proyeksi realisasi sebesar 12,42 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Data jumlah kunjungan dari BPS baru tersedia hingga Agustus 2026 dengan jumlah 10,578 juta. Adapun target proyeksi yang dibuat didukung dengan rencana pelaksanaan event internasional MotoGP di Mandalika.

pada bulan Oktober 2026. Selain itu, koordinasi perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang masih terus berjalan diharapkan dapat diterapkan segera.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Ekosistem Pariwisata	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rakor Terbatas terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan pada 24 Agustus 2026. 2. Telah dilaksanakan Rapat Sinergi dan Dukungan Pelaku Usaha guna Mendorong Percepatan Investasi Sektor Pariwisata untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada 23 September 2026 3. Telah tersusun kajian terkait dampak kebijakan bebas visa bersama World Bank 4. Telah tersusun kajian oleh tim internal Asdep Pengembangan Pariwisata terkait Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan 5. Telah tersusun kajian terkait model keterkaitan aktivitas pariwisata dengan Tourism Direct GDP (TDGDP) 6. Telah tersusunnya brief note terkait pengembangan kebijakan insentif stimulus perekonomian sektor pariwisata

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah dengan melaksanakan:

1. Mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka membahas strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2026 pada 3, 11, dan 29 September, khususnya untuk melalui optimalisasi kebijakan BVK.

2. Mengikuti rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan event MotoGP yang dilaksanakan pada 9, 13, 15, 23, 28 Juli; 4 dan 31 Agustus; serta 7 September 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut, dalam pembahasan perluasan kebijakan strategi pertumbuhan ekonomi ditekankan bahwa komponen “I” (Investment) dalam GDP harus didorong, salah satunya melalui kebijakan BVK yang menghilangkan hambatan administrasi bagi wisatawan mancanegara termasuk investor.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan III tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan destinasi pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 30 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utama yang dihadapi adalah koordinasi lintas sektor. Pada pembahasan perluasan Bebas Visa Kunjungan, perbedaan kepentingan antar instansi, khususnya terkait penerimaan negara, aspek keamanan, pengawasan keimigrasian, dan tujuan peningkatan kunjungan wisatawan, menyebabkan proses penyelarasan serta penetapan kebijakan belum dapat berlangsung secara cepat. Sementara itu, pengembangan ekosistem asuransi pariwisata masih terkendala oleh fragmentasi kewenangan, belum terintegrasinya perizinan, sertifikasi, standar keselamatan, pengawasan, dan persyaratan asuransi, serta rendahnya literasi dan kepesertaan asuransi di kalangan wisatawan dan pelaku usaha. Keterbatasan data mengenai profil risiko, kecelakaan, klaim, dan jumlah pelaku usaha juga menyulitkan penyusunan produk asuransi yang sesuai dan terjangkau.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa rekomendasi perbaikan untuk pengeluaran wisatawan mancanegara adalah eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk pengimplementasian perluasan BVK.

1.3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Pariwisata; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis terkait bidang pembiayaan pengembangan pariwisata mencakup penyusunan draf regulasi tentang Dana Pariwisata Berkualitas (DPB).

Persentase keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

- Tahap 4, rentang persentase 72,5 – 100%
- Tahap 3, rentang persentase 46 – 72,5%
- Tahap 2, rentang persentase 21 – 45%
- Tahap 1, rentang persentase 0 – 20%

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata diukur dari realisasi pelaksanaan sudah sampai tahap yang mana. Adapun rincian Realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata hingga TW III 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	-------------------	---------------------	-----------	-----------

IKU 1.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata	Per sent ase	100	72,5	60	82,75
---	--------------	-----	------	----	-------

Realisasi triwulan III 2026 menunjukkan bahwa saat ini keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata masih berada dalam Tahap 2, yaitu Penyusunan Alternatif Rekomendasi, atau penyelesaian sebesar 60%, melalui koordinasi pembentukan Tim Penyusunan Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

<i>IKU 1.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata</i>			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait muatan substansi tata kelola program IQTF	Tertunda dan digeser	Belum terselesaikannya paraf persetujuan dari Menteri Pariwisata dan Menteri Keuangan terhadap draf RPerpres IQTF.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan membentuk Tim Penyusun Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF) melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 8 Tahun 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas adalah ditetapkan tim penyusun IQTF.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh

implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan III tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi dan diskusi terkait isu-isu strategis pariwisata di sektor pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu belum terselesaikannya paraf persetujuan dari Menteri Pariwisata dan Menteri Keuangan terhadap draf RPerpres IQTF.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun rekomendasi perbaikan melalui koordinasi dengan Kemenpar dan Kemenkeu mengenai hambatan pemberian paraf persetujuan dari Menpar dan Menkeu.

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan menjadi dua indikator sebagai berikut:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Pariwisata; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Persentase Efektivitas SKP di lingkup Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata adalah:

1. Regulasi mengenai Badan Otorita Pariwisata
2. Regulasi mengenai Tugas dan Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

Persentase keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan tata kelola destinasi pariwisata dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

- a. Tahap 4, rentang persentase 72,5 – 100%
- b. Tahap 3, rentang persentase 46 – 72,5%
- c. Tahap 2, rentang persentase 21 – 45%
- d. Tahap 1, rentang persentase 0 – 20%

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata diukur dari realisasi pelaksanaan sudah sampai tahap yang mana. Adapun rincian Realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata hingga TW III 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Persentase	80	70	70	100

Realisasi TW III 2026 menunjukkan bahwa saat ini keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan tata kelola destinasi pariwisata masuk dalam Tahap 3, yaitu Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan dengan realisasi capaian sebesar 70%. Pada tahap tersebut, unit kerja telah:

1. Penandatanganan MoU pemanfaatan 4 Candi yang dihadiri para pihak pada 17 September 2026;
2. Kunjungan Kerja terkait Akselerasi pembangunan Badan Otorita Borobudur dan Badan Otorita Danau Toba;
3. Monitoring kemajuan pembangunan PSN Sektor Pariwisata (5 DPP) melalui monitoring Renaksi RIDPN Fase 1;
4. Monitoring Pengembangan KEK pariwisata Lido; dan
5. Diskusi awal penyusunan pedoman Peninjauan Kembali RIDPN.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan	Terlaksana	1. Koordinasi Persiapan Kunjungan Lapangan Lombok–Gili Tramena pada 2 dan 14 Juli 2026. 2. Diskusi dan Kunjungan

	terkait terkait tata kelola destinasi pariwisata		Lapangan BPODT di Toba Caldera Resort pada 6–8 Juli 2026. 3. Audiensi Pembahasan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) bersama Kemenpar pada 9 Juli 2026. 4. Pembahasan Penyempurnaan Regulasi Kelembagaan BOP dan Rancangan Perpres BOP pada 28 Juli serta 4, 10, 21, dan 27 Agustus 2026. 5. Diskusi Teknis MoU Candi pada 4, 12, dan 20 Agustus 2026. 6. Kunjungan Lapangan dan Diskusi Pengembangan Kawasan Borobudur Highland (BOB) pada 10 Agustus dan 17 September 2026. 7. Audiensi dan Diskusi Teknis Peninjauan Kembali RIDPN pada 18 Agustus dan 1 September 2026. 8. Diskusi Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata bersama ADB pada 1 September 2026. 9. Kunjungan Kerja dan Diskusi Pengembangan Pariwisata di KEK Lido dan KEK Industropolis Batang pada 16 dan 23 September 2026. 10. Diskusi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pacitan pada 17 September 2026. 11. Audiensi Bapperida Sumatera Utara terkait Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Industri pada 24 September 2026. 12. Koordinasi Pemulihan Desa Adat Sade Pascakebakaran pada 26 dan 29 September 2026.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan

untuk mencapai target kinerja adalah dengan mengikuti beberapa kegiatan terkait yang diselenggarakan stakeholder lain, yaitu:

1. Pembahasan Kerangka Kelembagaan Sektor Pariwisata dalam RKP 2027 pada 3 Juli 2026.
2. Penyusunan Rencana Aksi Tahap II dan Harmonisasi Regulasi 6 RIDPN pada 9 Juli 2026 serta beberapa pertemuan lainnya.
3. FGD Pengembangan Destinasi Pariwisata Regeneratif di Kepulauan Riau (Bintan) pada 21 Juli 2026.
4. Koordinasi Debottlenecking PSN Sektor Pariwisata, meliputi pembahasan aduan investasi, kepastian ruang lingkup PSN Danau Toba, dan pembebasan BPHTB pada 23 dan 28 Juli serta 4 Agustus 2026.
5. Koordinasi Penyiapan SQTDP dan Peningkatan Layanan Pariwisata Lombok pada 11 dan 27 Agustus 2026.
6. Peluncuran Infografis Statistik Pariwisata 2025 dan Workshop Data 10 DPP serta 3 DPR pada 20 Agustus 2026.
7. Rakor dan Kunjungan Lapangan Pengembangan Kepelabuhanan Belitung pada 16 September 2026.
8. Pembentukan Tim Kerja Kebijakan dan Tata Kelola Kelembagaan BOP melalui SK Deputy Nomor 7 Tahun 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Tersusunnya Rancangan Peraturan Menko Perekonomian tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur;
2. Pemulihan Desa Adat Sade, Lombok, NTB;
3. Rekomendasi tindak lanjut temuan permasalahan di DPP Lombok Gili-Tramena;
4. MoU Pemanfaatan 4 Candi untuk Kepentingan Umat Beragama.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan III tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan diskusi teknis terkait tata kelola destinasi pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam Penyusunan Permenko Tata Kelola Candi Borobudur perlu eskalasi tingkat eselon 1 agar dapat segera diusulkan di Setneg. Selain itu, Rapat koordinasi dewan pengarah masih dalam penjadwalan.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat

tercapai adalah dengan berkoordinasi dengan Biro Hukum dan TU Menko Perekonomian untuk percepatan proses penetapan Permenko Tata Kelola Canda Borobudur

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya Layanan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata yang Berkualitas berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pengembangan pariwisata; (d) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain terkait bidang pengembangan pariwisata; (e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan pariwisata. Sasaran Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata yang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik (sebagaimana penjabaran poin a hingga e), serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 4 Aspek yakni (1) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan; (2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan; (3) pengelolaan dan penanganan isu; (4) penyelesaian isu yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga; dan (5) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh dua indikator yakni Indikator Proses dan Indikator Hasil. Survey ini terdiri 21 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing - masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target indeks kepuasan layanan SKP pada tahun 2026 adalah 3 dari 4. Penetapan target 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asdep Pengembangan Pariwisata Tahun 2026.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Pariwisata pada tahun 2026 telah dilaksanakan Survey Kepuasan Layanan Semester I kepada stakeholder terkait. Adapun rincian Realisasi Indeks Kepuasan layanan SKP hingga TW III 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	-	-	N/A

Tidak dilaksanakan survey kepuasan layanan pada triwulan III tiap tahunnya karena survey dilakukan per semester.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Evaluasi hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Semester I Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan evaluasi survey kepuasan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Semester I Tahun 2026 melalui diskusi internal pada 20 Juli 2026
2	Persiapan survei kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di	Terlaksana	Telah tersusun form pertanyaan survey untuk pelaksanaan di Semester II 2026

	bidang pengembangan pariwisata semester II tahun 2026		
--	---	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan:

1. Berpartisipasi dalam Pembahasan Strategi Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) pada 17 Juli 2026
2. Mengikuti Persiapan Penyusunan SKM Online Tahun 2026 pada 8 Juli 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Ringkasan data hasil survey layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Semester I Tahun 2026.
2. Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Data pengisian SKM per September 2026 sebanyak 7 responden.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan survei yang menggunakan Google Form. Pengelolaan tata persuratan secara digital juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis perkantoran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, kendala utama dalam pencapaian target yang ditetapkan adalah:

1. Tingkat partisipasi responden dalam pengisian survei belum optimal, sehingga mempengaruhi representativitas hasil survei dan pencapaian skor yang diharapkan.
2. Pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung mengalami penyesuaian jadwal karena keterbatasan waktu dan koordinasi antarunit, sehingga implementasi program belum dapat berjalan secara maksimal pada Triwulan III.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi dan tindak lanjut kepada responden untuk mendorong partisipasi dalam pengisian survei, sehingga jumlah dan kualitas data yang diperoleh lebih optimal.
2. Memperkuat koordinasi antarunit melalui penyusunan jadwal yang lebih terstruktur, monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta percepatan penyelesaian kegiatan yang masih tertunda agar target kinerja pada triwulan berikutnya dapat tercapai.

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata yang Baik.

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program keasdepan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, program keasdepan ditunjang dengan kegiatan administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Asdep Pengembangan Pariwisata Tahun 2026. Adapun target triwulan III 2026 sebesar 69% atau mencapai tersedianya 5 paket dokumen yang sesuai di triwulan dimaksud. Pemilihan target ini berdasarkan progres penyusunan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan juga berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 86,9% atau mencapai 100% kinerja.

Adapun rincian Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata hingga TW III 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata	Persentase	92	86,9	86,9	100

Pada Triwulan III Tahun 2026, Asdep Pengembangan Pariwisata telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III 2026. Dalam rangka optimalisasi implementasi Srikandi, Asdep Pengembangan Pariwisata telah memproses naskah masuk dan naskah keluar melalui Srikandi secara optimal. Asdep Pengembangan Pariwisata juga telah melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan Dialog Kinerja dan penyusunan Sasaran Kinerja Tahun 2026. Selanjutnya Asdep Pengembangan Pariwisata telah melakukan optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja Ekon-GO. Pelaporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Output melalui Aplikasi E-Monev

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	Terlaksana	Sudah terlaksana melalui penetapan SK Pokja Asdep Pengembangan Pariwisata Nomor 1 s.d. 6 Tahun 2026
2	Penyusunan matriks manajemen risiko	Terlaksana	Sudah terlaksana melalui rapat pembahasan yang dilakukan oleh Sesdep Kedeputan V pada 16 April 2026 (Triwulan II)
3	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III	Terlaksana	Sudah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja TW II dan di upload di <i>website</i> kinerja.ekon.go.id
4	Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2027	Terlaksana	Sudah dilakukan pembahasan awal terkait Renja 2027

5	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI Triwulan III	Terlaksana	Semua surat masuk dan keluar dilakukan melalui SRIKANDI
---	--	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan berpartisipasi sebagai penyumbang program untuk RB Tematik 2026 dengan tema Kemiskinan melalui rakor yang dilaksanakan pada 28 Agustus dan 10 September 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Terususunnya formulir Manajemen Risiko Asdep Pengembangan Pariwisata;
2. Laporan Kinerja Triwulan III 2026;
3. Revisi TOR dan RAB atas Revisi Renja 2027.
4. SK Pokja Asdep Pengembangan Pariwisata Nomor 1 s.d. 6 Tahun 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran dengan terdapat tempat penyimpanan file berbasis cloud dengan pemberian akses dokumen yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja untuk meningkatkan kinerja, pengelolaan tata persuratan secara digital sebagai bentuk kemudahan akses bekerja, dilakukan lebih banyak koordinasi yang dilaksanakan secara daring/online sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat tercipta dengan baik pada DIPA Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 belum ada kendala dalam pelaksanaan RB. Terdapat beberapa penyesuaian dan rencana aksi untuk mencapai target agar memberikan kinerja yang baik dan menciptakan reformasi birokrasi yang memuaskan.

Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

Jakarta, 9 Oktober 2026

Asisten Deputi Pengembangan
Pariwisata



Herfan Brilianto Mursabdo